

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah ada penelitian budaya politik. Setiap penelitian mempunyai fenomenanya pada setiap lokasi mempunyai kesamaan pada hal orientasi dan objek akhir dari budaya politik. Ada hal yang menjadi penelitian ini ialah peneliti mengambil objek di Kabupaten Kebumen yang dimana pada daerah tersebut belum ada yang mengakat mengenai budaya politik.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metodelogi Penelitian</b>	<b>Teori dan Konsep</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Ari Alfiatul Rochmah	BUDAYA POLITIK DAN ISLAMISME: Mengukur Tingkat Pengaruh Islamisme terhadap Kesadaran Politik Santri di Kota Solo (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Muayyad, Mangkuyudan, Solo)	Campuran	Teori Budaya Politik dan konsep kesadaran politik	Secara parsial Pemahaman santri tentang Islam sebagai ideologi politik dan perempuan sebagai konsep moral saja berdampak signifikan terhadap keputusan politik santri. Namun, pemahaman tentang kewajiban melaksanakan syariat Islam tidak berpengaruh signifikan. <sup>13</sup>
Nida' Maulida	Peran Ulama Nahdlatul	Kualitatif Deskriptif	Teori Pemikiran	Peran ulama di Kabupaten Pasuruan

<sup>13</sup> Rochmah, A. A. Budaya politik dan islamisme: mengukur tingkat pengaruh islamisme terhadap kesadaran politik santri di Kota Solo (studi kasus Pondok Pesantren Al Muayyad, Mangkuyudan, Soloo (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

	‘Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi		Politik Al-Farabi	sangat berpengaruh dalam masyarakat yang menjadi kewenangan ulama atau imam. Memantau informasi keagamaan di masyarakat, menjalankan agama dengan benar. Dan memberikan wawasan Masyarakat untuk Pemerintahan dan Ilmu Politik dan menghimbau kepada masyarakat untuk menginformasikan agar tidak golput dan juga mengingatkan masyarakat untuk memilih satu orang Pemimpin merupakan kebutuhan bagi Indonesia di masa depan. <sup>14</sup>
--	--	--	-------------------	---

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

**Pertama**, penelitian skripsi yang diteliti oleh Ari Alfiatul Rochmah pada Tahun 2016 dengan judul “Budaya Politik dan Islamisme: Mangukur Tingkat Pengaruh Islamisme Terhadap Kesadaran Politik Santri di Kota Solo (Studi Kasus Pondok Pesantren AL Muayyad, Mangkuyudan, Solo)”. Penulis menjelaskan sejauh mana dimensi-dimensi Islamisme berpengaruh terhadap empat indikator kesadaran politik yang dimiliki santri Pondok Pesantren Al Muayyad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixed research*

<sup>14</sup> Maulida, N. (2019). Peran ulama Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan perspektif Al-Farabi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

(campuran) teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu santri berusia 17 tahun pada 2016 dan tengah duduk di XI MA dan SMA Al Muayyad tahun pelajaran 2015/2016.

Varibel yang digunakan pada penulis ini yaitu kesadaran politik sebagai pembanding Islamisme yang kemudian dianalisis dengan indicator kesadaran politik. Penulis ini menggunakan empat indicator kesadaran politik menurut Gabriel Almond dan Sidney, yaitu kesadaran *input*; kesadaran *output*; penerimaan informasi dan memberikan opini; serta pilihan politik. Sementara dalam varibel Islamisme penulis menggunakan empat dimensi Islamisme menurut Olivier Roy yaitu Islam sebagai ideologi politik, kewajiban penerapan syariat Islam, dan perempuan sebagai imajinasi moral. Dari keempat indikator kesadaran politik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Islamisme dengan kesadaran politik santri meliputi kesadaran *input*; kesadaran *output*; penerimaan informasi dan memberikan opini; serta pilihan politik santri Pondok Pesantren Al Muayyad, Mangkutudan, Solo.

Berbeda dengan hasil analisa data secara keseluruhan, dari hasil Analisa data secara parsial terhadap masing-masing indikator, hanya dimensi Islam sebagai ideologi politik berpengaruh signifikan terhadap ketiga indikator, kesadaran input, penerimaan informasi dan memberikan opini, serta pilihan politik. Sedangkan pada variabel kesadaran output hanya dimensi perempuan sebagai imajinasi moral yang memiliki pengaruh signifikan.

Persamaan dari penelitian Ari Alfiatul Rochmah dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai budaya politik dan islamisme. Meskipun demikian, ada perbedaan skripsi ini dengan penelitian tersebut yaitu; terletak pada variabel penelitian, subjek penelitian, teori, dan lokasi penelitian

**Kedua**, penelitian skripsi yang di teliti oleh Nida' Maulida pada Tahun 2019 dengan judul “Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi”. Penulis menjelaskan mengenai peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pasuruan ditinjau berdasarkan pikiran Al-Farabi.

Penulis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris. Subjek utama dalam penelitian ini adalah ketua PCNU Kabupaten Pasuruan yaitu K.H. Imron Mutamakkin selaku anggota Majelis keluarga Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Besuk Kejayan Kabupaten Pasuruan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan yaitu Ba Muhammad AFIN selaku wakil ketua sekaligus sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan Ba Akhmad Munasib Syehad selaku pengasuh yayasan panti asuhan Darul Muttaqin di Kraton Kabupaten Pasuruan, serta beberapa ulama yang ada di Kabupaten Pasuruan dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu KH. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan.

Persamaan dari penelitian Nida' Maulida dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh ulama dalam pemilihan umum. Meskipun

demikian, ada perbedaan skripsi ini dengan penelitian tersebut yaitu; jika penelitian sebelumnya membahas peran ulama NU dan Muhammadiyah, penelitian skripsi ini hanya berfokus pada satu kelompok ulama yaitu dari NU. Tidak hanya itu, jika penelitian sebelumnya membahas mengenai pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden, penelitian ini menggunakan pandangan di pemilihan umum ketua daerah. Lokasi penelitian pun berbeda, pada penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah yaitu Kabupaten Kebumen. Artinya perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, subjek penelitian, teori, dan lokasi penelitian.

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Budaya Politik**

Budaya dalam penafsiran luas ialah metode hidup dari suatu publik. Golongan sosiolog serta antropolog menekankan kebudayaan selaku pewarisan watak yang berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmuwan politik menempatkan penafsiran budaya pada arti kecil yang merujuk pada orientasi psikologis warga atas obyek-obyek politik semacam partai, pemerintahan, konstitusi, yang diekspresikan lewat kepercayaan, simbol dan nilai-nilai. Simbol dan nilai inilah yang membentuk perilaku serta pemikiran sesuatu proses politik yang berlangsung atas mereka.

Perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas seseorang atau kelompok dalam aktivitas politik. Bagi Surbakti, perilaku politik ibarat kegiatan yang konsisten dengan pembuatan kebijakan dan pembuatan kebijakan. Perilaku politik adalah elemen atau sudut pandang universal. Selain sikap politik, ada sikap

perilaku lain seperti sikap organisasi, perilaku budaya, perilaku ekonomi konsumen, sikap religius, dan lain-lain<sup>15</sup>

Perilaku politik meliputi anggapan internal semacam asumsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta aksi- aksi nyata semacam memberikan suara, keluhan, lobi- lobi, dan sebagainya. Asumsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai uraian, informasi dari sesuatu Mengenai, maupun gambaran tentang obyek maupun atmosfer politik dengan tata cara tertentu.

Secara mendasar, ada tiga model ataupun aliran pemikiran sikap yang digunakan, ialah model sosiologis, model psikologis, serta model opsi rasional ataupun model ekonomi- politik. Model yang terakhir ini pula diketahui selaku model opsi rasional. Berikut merupakan deskripsi dari bermacam model yang ada.<sup>16</sup>

Menurut Almond dan Verba, budaya politik adalah sikap khas terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang berbeda dan terhadap peran warga negara dalam sistem ini. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusian aspirasi politik di antara individu-individu yang bersangkutan. Mereka juga mencatat bahwa warga negara selalu mengidentifikasi diri mereka dengan orientasi mereka terhadap simbol dan institusi negara. Dengan orientasi ini, mereka juga

---

<sup>15</sup> Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/72> Hal 40

<sup>16</sup> Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2016). Partisipasi politik dan perilaku memilih pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 19. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/533/341> Hal 119

mengevaluasi dan mempertanyakan tempat dan peran mereka dalam sistem politik.<sup>17</sup>

Ada pedoman untuk memahami budaya politik; (1). Budaya politik adalah sisi politik dari nilai-nilai yang dibentuk oleh pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Sebagian besar masyarakat mengenal dan mengenal mereka semua. Budaya politik memberikan pemahaman yang rasional terhadap penolakan atau penerimaan nilai dan norma lain, (2). Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinal dan aspek umumnya. Yang pertama menekankan isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Bagian kedua (aspek umum) menganalisis bentuk, peran dan karakteristik budaya politik, seperti B. militan, utopis, terbuka atau tertutup (3). Esensi dan ciri budaya politik dalam kaitannya dengan persoalan nilai merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pandangan hidup dalam kaitannya dengan prinsip utama dan (4). Wujud budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu H. sikap terbuka dan tertutup, derajat militansi terhadap orang lain dalam masyarakat. Model tata kelola (kepatuhan atau promosi inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mempromosikan mobilitas), prioritas politik (fokus pada bisnis atau politik).<sup>18</sup> Terdapat tipe-tipe dari budaya politik pertama, orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan terhadap politik, segala kewajibannya dan peranannya. Kedua, orientasi Afektif ini berupa perasaan mengenai sistem politik, peranannya dan penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif yaitu pendapat

---

<sup>17</sup>Sumartono, S. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. LUGAS Jurnal Komunikasi, 2(1), 20-26. Dapat diperoleh: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/lugas/article/download/119/104> diakses pada 12 April 2022. Hal. 21

<sup>18</sup> Ibid

dan keputusan atas objek politik dengan diikutkan perasaan dan informasi yang ditangkap.

Budaya Politik Indonesia disaat ini ialah Campuran dari Parokial, Kaula, dan juga Partisipan, dari segi budaya Politik Partisipan, Segala ciri- cirinya telah terjalin di Indonesia dan juga bukti diri budaya politik Parokial pula ada yang memenuhi yakni semacam berlangsungnya pada masyarakat tradisional dan juga pada budaya politik kaula ada yang memenuhi semacam masyarakat menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah. Sehabis masa reformasi memanglah orang menyebut Indonesia telah mengenakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan juga tidak tunduk hendak keputusan maupun kinerja pemerintah.<sup>19</sup>

Dengan memahami bagaimana budaya, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat mempengaruhi perilaku politik orang-orang, termasuk Kyai NU. Dengan mempelajari budaya politik masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana Kyai NU berperan dalam mengendalikan isu-isu dan konflik yang terjadi, serta bagaimana Kyai NU mempengaruhi pemikiran dan perilaku politik masyarakat. Dengan menggunakan teori budaya politik, peneliti juga dapat mempelajari bagaimana Kyai NU memainkan peranannya sebagai penyeimbang dan peredam konflik internal dalam masyarakat, serta bagaimana Kyai NU membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memfasilitasi edukasi politik.

---

<sup>19</sup> Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia. JURNAL SERAMBI ILMU, 17(1).

Dalam penelitian ini, teori budaya politik digunakan untuk menganalisis dan memahami interaksi antara budaya dan politik, serta memahami bagaimana budaya mempengaruhi perilaku politik dan bagaimana politik mempengaruhi budaya. Teori ini membantu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap politik, dan bagaimana budaya mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik dan partisipasi politik. Teori budaya politik juga membantu untuk memahami bagaimana institusi politik dan praktik politik dipengaruhi oleh budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi konsep-konsep dan norma-norma politik.

#### a. **Budaya Politik Parokial**

Budaya politik parokial merupakan jenis budaya politik yang sangat rendah. Dalam budaya politik ini publik tidak merasakan kalau mereka merupakan masyarakat negeri dari sesuatu negeri, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terselip kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak mempunyai atensi terhadap apa yang terjalin dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, serta sedikit membicarakan masalah-masalah politik.<sup>20</sup> Budaya politik parokial dapat kita lihat ciri-ciri yang nampak sebagai berikut:

1. Terbatas pada wilayah atau lingkup kecil, sempit misalnya seperti Provinsi.

Dalam masyarakat tradisional tidak terdapat peranan khusus dalam politik,

---

<sup>20</sup> Syuhada, O (2020). Fenomena Budaya Politik Parokial Dan Perwujudandemokrasi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Journal Presumption of Law*. [ejournal.unma.ac.id](https://www.ejournal.unma.ac.id). dapat diperoleh: <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/336>. Hal. 3-4. Diakses pada 17 Juni 2022

tetapi diffuse (menyebarkan) politik ekonomi dan agama. Jadi para pelaku politik melakukan peranannya serem dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain;

2. Terbatasnya diferensiasi tidak terdapat peranan politik bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.
3. Frekuensi orientasi terhadap sistem selaku obyek universal, obyek-obyek input( kesungguhan pengetahuan serta perbuatan tentang proses penyaluran seluruh tuntutan yang diajukan ataupun di organisasi oleh publik, tercantum prakarsa guna menerjemahkan ataupun jenis tuntutan- tuntutan tersebut, sehingga menjadi kebijakan yang otoritatif sifatnya), obyek-obyek output( kesungguhan pengetahuan serta perbuatan tentang proses aktivitsa bermacam cabang pemerintahan yang berkenaan dengan pelaksanaan serta pemaksaan keputusan- keputusan otoritatif ataupun berkenaan dengan peranan pembuatan undang- undang oleh legislatif, guna penerapan peraturan oleh eksekutif( termasuk birokrasi) serta guna peradilan( yudikatif) serta individu selaku partisipan aktif mendekati nol;
4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik;
5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang sangat minim;
6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif;

7. Yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/ kekuasaan politik dalam masyarakatnya.

#### **b. Budaya Politik Kaula**

Budaya politik kaula merupakan budaya politik dengan publik yang mempunyai atensi, kepedulian, serta pemahaman terhadap sistem politik secara totalitas, dan juga alami kemajuan dalam sosial serta ekonomi, hendak tapi publik pasif dalam memberikan masukan terhadap sistem politik.<sup>21</sup> Ciri-ciri budaya politik kaula sebagai berikut ;

1. Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah, hanya sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah,
2. warga dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah,
3. warga menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi atau ditentang,
4. dan sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif.

#### **c. Budaya Politik Partisipan**

Budaya politik partisipan ini diisyaratkan oleh terdapatnya pemahaman politik di publik diiringi pemahaman guna berfungsi aktif dalam sesuatu proses politik. Publik tidak menerima langsung keputusan politik, sebab merasa selaku anggota aktif dalam kehidupan politik yang mempunyai hak serta tanggung jawab.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pureklolon, T. T. (2021). EKSISTENSI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN. *Communitarian*, 3(1). Hal. 416

<sup>22</sup> Ibid. Hal 417

Ciri-ciri budaya politik partisipan adalah :

1. warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya,
2. tidak begitu saja menerima kebijakan politik tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran,
3. warga dapat menolak menurut penilaiannya sendiri, serta menjadi warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

### 2.2.1. Elit Politik

Teori elite klasik: bahwa beberapa orang memiliki lebih banyak kekuasaan politik dibanding dengan yang lain dan mereka inilah yang disebut elite politik.<sup>23</sup> Berdasarkan Pareto, setiap warga diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kelas-kelas yang diharapkan bagi munculnya mereka di kekuasaan politik yang penuh.

Menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: pertama, kelas atas, yaitu elite yang terbagi menjadi elite penguasa (*Managed Elite*) dan elite non-Governing (*Non-Governing Elite*) sebagai tokoh agama, tokoh pemuda, pemilik, dan seterusnya. Kedua, lapisan bawah adalah orang-orang non-elit seperti masyarakat umum, petani, dll.<sup>24</sup>

Robert Putnam menyatakan bahwa ada lima aspek yang terkait dengan elit dan kekuasaan politik, yaitu; Pertama, kekuatan politik, seperti barang sosial lainnya, didistribusikan secara tidak adil. Kedua, publik pada bawah nya dibagi

<sup>23</sup> Putnam, R. D. (2006). Studi Perbandingan Elite Politik.

<sup>24</sup> Amin, Khairul. "Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa." Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) 11.2 (2017): 167-187. Dapat diakses <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/download/10096/7962>. Diakses pada 15 Maret 2022. Hal.

jadi dua kelompok, ialah mereka yang mempunyai kekuatan politik yang signifikan dan mereka yang tidak mempunyai kekuatan politik. Ketiga, secara internal, semua kelas orang adalah homogen, bersatu dan sadar. Keempat, kelas elit mengendalikan kelangsungan hidupnya sendiri, sebab anggotanya berasal dari kelas sosial terbatas. Kelima, kelompok elit secara intrinsik mandiri.<sup>25</sup> Yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teori elite dari Robert Putnam.

Dalam penelitian Peranan Kyai Nadhatul Ulma (NU) dalam Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020, teori Elite Politik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Kyai Nadhatul Ulma memainkan peran sebagai kelompok elit dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi hasil Pilkada Kabupaten Kebumen. Peranan sendiri menurut terminology ialah seperangkat tindakan yang diharapkan ada pada seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peranan dalam bahasa Inggris yaitu "*role*", artinya "*person's task or duty in undertaking.*" Maksudnya ialah seseorang yang memiliki tugas atau kewajiban dalam suatu usaha atau pekerjaan.<sup>26</sup> Peran dimaksud selaku perangkat tingkah yang diharapkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan dalam warga. Sebaliknya peranan merupakan aksi yang dicoba oleh seseorang dalam sesuatu peristiwa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal 5

<sup>26</sup> Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, h. 854

Teori peran menurut Linton merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan sosial aktor yang bertindak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh kebiasaan (budaya). Pada teori ini, Linton menjelaskan bahwa seseorang mempunyai kapasitas tertentu misalnya seperti; dokter, orang tua, mahasiswa, perempuan, dan lain sebagainya dengan keinginan orang tersebut integritasnya sesuai dengan posisi tersebut (Hutama 2011 *dalam*<sup>28</sup>). Perannya adalah komponen dinamis posisi (status). Seseorang memainkan peran ketika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peran mereka. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk tujuan ilmiah. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat eksis secara terpisah. Peran dan posisi saling eksklusif; tidak ada yang tanpa yang lain. Setiap orang memainkan bagian tertentu yang diambil dari kecenderungan sosialnya. Selain itu, ini menyiratkan bahwa kesempatan dan layanan yang dia berikan kepada masyarakat ditentukan oleh fungsinya.<sup>29</sup> Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Tempat seseorang dalam masyarakat (juga dikenal sebagai "posisi sosial" mereka) adalah komponen statis yang menunjuk lokasi mereka dalam sekelompok orang. Istilah "peran" lebih menyinggung fungsi, proses, dan penyesuaian diri. Jadi seseorang memiliki tempat di masyarakat dan berperan.<sup>30</sup>

Biasanya, orang memiliki beberapa keadaan sekaligus dan dengan demikian memiliki beberapa peran. Misalnya, seorang ulama secara bersamaan

---

<sup>28</sup> Jannah and Junaidi. 2020. Faktor Penghambat Guru sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA 2 Batusangkar. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol 1, No. 3.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Loc.cit

<sup>30</sup> Ibid., h. 213

dapat menjadi pasangan, pengusaha, atau presiden suatu organisasi. Setiap status membawanya lebih dekat dengan orang yang berbeda. Sebagai seorang ulama ia melayani agama, sebagai seorang suami ia mempertahankan hubungan istimewa dengan istri dan anak-anaknya, sebagai pengusaha ia berhubungan dengan wisatawan dan perwakilan dunia bisnis, dan sebagai kepala organisasi dengan anggotanya. Keadaan seseorang juga dikenal sebagai "*Status Set*" atau seperangkat keadaan.<sup>31</sup>

Relasi-relasi yang timbul dari suatu "status set" mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari "*status set*." Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Setiap status perangkat diterjemahkan ke peran tertentu, karena setiap status diberi nama serangkaian peran. Peran sebagai pendeta meliputi peran-peran seperti:

mengelola masjid, memimpin kebaktian, berdakwah, menginjili, menjadi panutan, dan menasihati masyarakat. Dia menjabat sebagai kepala keluarga, pencari nafkah keluarga, guru anak-anak, dan peran lain sebagai seorang suami. Setiap tipe individu yang dia tangani dalam kapasitas ini memiliki harapan yang berbeda tentang dirinya. Tekanan internal dalam tubuh suksepsi peran yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan sikap yang menjadi

---

<sup>31</sup> Karel J. Veeger, et.al., Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 60

ciri setiap koneksi interaksi akan disorot, antara lain, oleh analisis sosial yang terkait dengan status dan peran.<sup>32</sup>

Mengenai peran Perkumpulan Taklim dalam artikel ini, beberapa kegiatan pertemuan taklim atau rangkaian kegiatan pertemuan taklim dapat dijadikan sebagai perantara dalam berbagai kegiatan penguatan komunitas muslim khususnya di desa Payabenua.

Teori peran adalah teori yang merupakan kombinasi dari berbagai teori, tren, dan disiplin ilmu. Istilah “peran” berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus memainkan karakter tertentu, dan dalam posisinya sebagai karakter, ia diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Juga peran atau peran yang dimainkan oleh Bruce J. Cohen,<sup>33</sup> juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peran memainkan bagaimana seseorang benar-benar melakukan peran.
- 2) Prescribed role adalah cara masyarakat mengharapkan peran tertentu dari kita.
- 3) Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami oleh satu atau lebih posisi yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang bertentangan.
- 4) Role Gap (Jarak Peran) adalah realisasi emosional dari peran tersebut.
- 5) Kegagalan peran adalah kegagalan seseorang untuk menjalankan peran tertentu.
- 6) Panutan adalah seseorang yang perilakunya kita tiru, tiru, ikuti.
- 7) Himpunan atau ruang lingkup peran (role set) adalah hubungan seseorang dengan orang lain saat menjalankan perannya.

---

<sup>32</sup> Ibid., h. 60-62

<sup>33</sup> <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 28 September 2012), h. 10-11

8) Ketegangan peran adalah kondisi yang muncul ketika seseorang merasa sulit untuk memenuhi tuntutan atau tujuan peran mereka karena ketidakadilan dan tujuan yang bertentangan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Livinson yang dikutip Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- a) peran meliputi norma-norma yang menyatakan kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat,
- b) peran adalah pemahaman tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat..<sup>34</sup>

Dengan memfokuskan pada bagaimana peran Kyai NU diakui dan diharapkan oleh masyarakat dan bagaimana peran itu dipahami dan dimainkan oleh Kyai NU sendiri. Teori peranan dapat menjelaskan bagaimana Kyai NU memainkan peran sebagai penyeimbang atas isu-isu yang beredar, peredam konflik internal, dan faktor edukasi politik bagi masyarakat. Dengan menganalisis bagaimana Kyai NU memahami dan memainkan peran tersebut, teori peranan dapat membantu dalam menentukan tingkat pengaruh dan dampak dari peran Kyai NU dalam pilkada kabupaten Kebumen tahun 2020.

### 2.3. Alur Berpikir

Alur berpikir dalam penelitian ini bisa didasarkan pada peran Kyai NU dalam Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020. Penulis dapat mengawali dengan melakukan analisis terhadap peran Kyai NU sebagai tokoh politik dan bagaimana

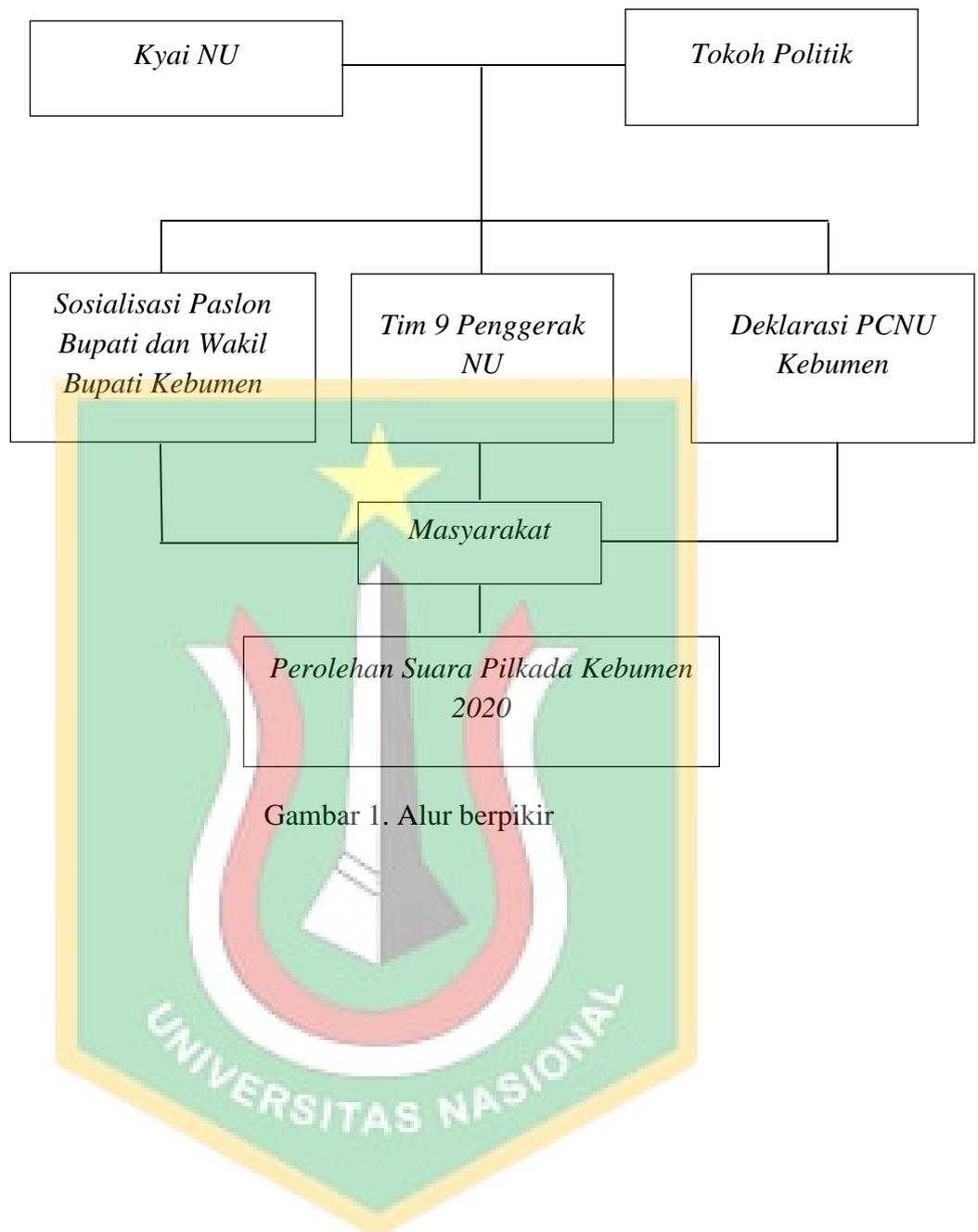
---

<sup>34</sup> Ibid., h. 11-12

peran Kyai NU mempengaruhi sosialisasi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Kemudian, penulis bisa mengkaji bagaimana Tim 9 Penggerak NU mempengaruhi sosialisasi paslon dan bagaimana Deklarasi PCNU Kebumen mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, analisis perolehan suara Pilkada Kebumen 2020 bisa menjadi bagian penting untuk menilai keberhasilan peran Kyai NU dalam Pilkada.

Dengan mengikuti alur berpikir ini, penulis bisa membuat analisis yang lebih dalam dan menyeluruh terkait peran Kyai NU dalam Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020. Penulis bisa membahas bagaimana Kyai NU berperan sebagai tokoh politik, bagaimana Kyai NU mempengaruhi sosialisasi paslon dan bagaimana Kyai NU mempengaruhi perolehan suara masyarakat. Analisis ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kyai NU dalam Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 dan bagaimana peran Kyai NU mempengaruhi hasil Pilkada.





Gambar 1. Alur berpikir